

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang melakukan usaha-usaha pembangunan yang secara umum berorientasi pada bagaimana memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kenyataan bahwa negara-negara yang sedang berkembang cenderung menghadapi permasalahan yang kompleks yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat menuntut kepentingan negara tersebut untuk melakukan pembangunan yang lebih cepat. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu negara dalam menanggulangi persoalan-persoalan keterbelakangan seperti tingkat taraf hidup yang rendah, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang pada umumnya dialami oleh negara-negara dunia ketiga.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga turut menghadapi problematika yang serupa dalam melaksanakan upaya-upaya pembangunannya. Tentunya usaha-usaha yang dilakukan tidak dapat terlepas dari sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena sejatinya, pemerintah daerah lah yang lebih mengerti tentang kondisi daerahnya masing-masing, sehingga segala bentuk regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat harus dirumuskan kembali oleh pemerintah daerah supaya arah kebijakan dalam pelaksanaan

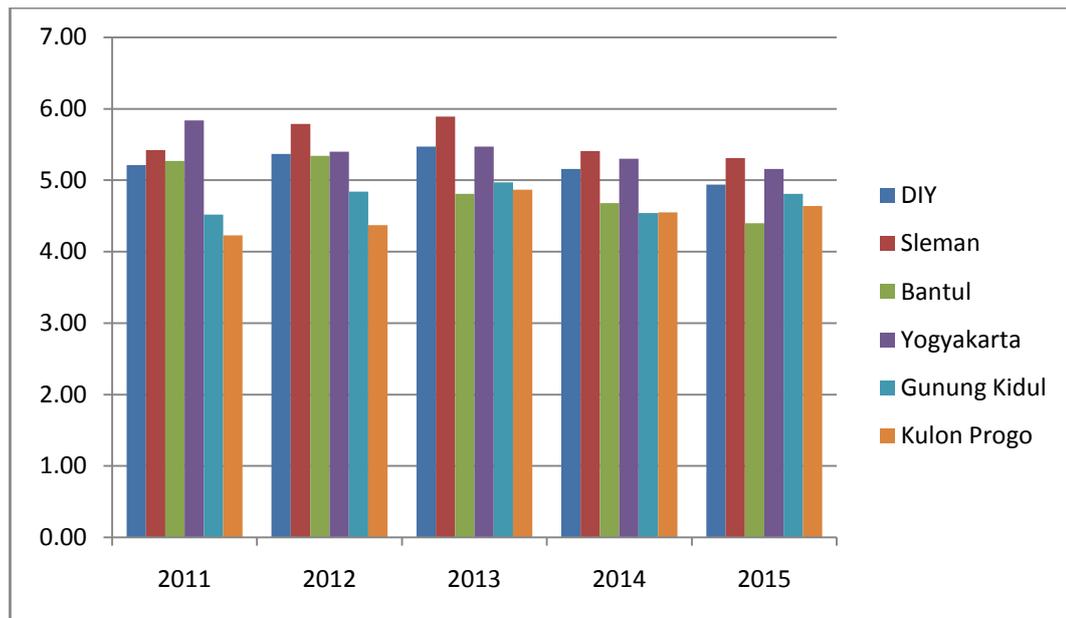
pembangunan ekonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

UU No. 9 Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan mengandalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan karakteristik masyarakatnya sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Maka dari itu, dibutuhkan suatu indikator yang dapat digunakan dalam mencapai pembangunan, salah satunya adalah PDRB. Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahunnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi tertua kedua setelah Provinsi Jawa Timur yang hingga saat ini menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata “istimewa” di nama provinsinya. Sebagai daerah istimewa, provinsi ini memiliki otonomi khusus dalam menjalankan sistem

pemerintahannya. Daerah yang memiliki banyak julukan diantaranya sebagai kota pelajar dan kota wisata ini memiliki keunikan tersendiri dalam karakteristik wilayahnya, baik keadaan topografi serta struktur ekonominya.



Sumber : BPS DIY, BPS Kabupaten se-DIY

GAMBAR 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Kabupaten se-DIY
Tahun 2011-2015 (persen)

Gambar 1.2 diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta dan lima kabupaten/kota yang sangat berfluktuatif. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 83,46 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 79,53 triliun rupiah pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh sektor ekonomi yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami perlambatan

jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tiga tahun sebelumnya yang mencapai 5,16 persen, 5,47 persen, dan 5,37 persen. Kabupaten Sleman selalu menjadi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama empat tahun terakhir dibandingkan dengan keempat kabupaten/kota lainnya, bahkan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dengan capaian tertinggi sebesar 5,89 persen pada tahun 2013. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo selalu menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dari kelima kabupaten/kota yang terdapat di D.I. Yogyakarta, dua diantaranya sempat termasuk kedalam kategori daerah tertinggal yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo, namun seiring berjalannya waktu berkat peran aktif pemerintah daerah masing-masing akhirnya berhasil keluar dari kategori tersebut dengan tidak adanya nama kedua kabupaten tersebut dalam daftar kabupaten yang menjadi daerah tertinggal di Indonesia tahun 2015-2019 yang sudah dirilis oleh pemerintah.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota yang terletak di sebelah barat D.I. Yogyakarta, memiliki luas wilayah 586,27 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 408.947 jiwa di tahun 2015. Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Kulon Progo memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merancang pembangunan serta menyediakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dan juga mempunyai wewenang yang luas untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara

optimal sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dapat tercapai.

Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2015 mencapai 6,28 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 6,00 triliun rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen, sedikit lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2014 yang tumbuh mencapai 4,55 persen. Selama periode 2011-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta. Akan tetapi pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo berbeda arah dengan laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta, dimana pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta mengalami perlambatan, yang dapat terlihat pada gambar 1.1 sebelumnya.

Sesuai dengan visi dan misi brand Kabupaten Kulon Progo yakni *The Jewel of Java* yang berarti permata dari Pulau Jawa, kabupaten ini mempromosikan daerahnya sebagai daerah yang memiliki multi potensi alam yang didukung dengan sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat menarik para investor. Strategi pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana-rencana pembangunan daerah menjadi salah satu yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Terlebih lagi dengan masuknya beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru internasional, pelabuhan Tanjung Adikarta, dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional menjadikan Kabupaten Kulon Progo lebih menarik untuk dikaji secara mendalam. Sebagai

kabupaten dengan luas wilayah terluas kedua di D.I. Yogyakarta ini, penulis tertarik menjadikan daerah ini sebagai obyek penelitian karena sejumlah potensi yang muncul dari berbagai sisi, mulai dari letak geografis yang strategis karena berada di jalur perekonomian Pulau Jawa bagian selatan, memiliki keadaan topografi yang sangat bervariasi yang terdiri dari perbukitan, lereng dan pesisir, serta potensi alam yang sangat besar yang dapat dikembangkan di daerah ini.

Dengan fokus menggali dan mengembangkan potensi dari sektor-sektor andalan di kabupaten ini diharapkan dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya, sehingga keseluruhan sektor ekonomi di Kabupaten Kulon Progo dapat meningkat seiring sejalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan taraf hidup dan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Lincoln Arsyad, 1999).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan analisis lebih lanjut dan mengkaji lebih mendalam mengenai **“Analisis Sektor**

Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Strategi Pengembangannya : Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015”.

B. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah yang sangat luas, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada mengkaji sektor-sektor dan beberapa sub sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebagai indikator yang dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan berdasarkan data tahun 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian yang telah dipaparkan, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sektor apakah yang memiliki potensi sebagai sektor basis serta yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*?
2. Sektor manakah yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis *Klassen Typology*?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan menggunakan analisis SWOT?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Sektor yang memiliki potensi sebagai sektor basis serta yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*.
2. Sektor yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis *Klassen Typology*.
3. Strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan menggunakan analisis SWOT.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai hal-hal yang diteliti sehingga dapat menjadi sarana implementasi teori-teori yang diterima di bangku kuliah pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan tambahan wawasan tentang sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis di Kabupaten Kulon progo yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah terutama dalam bidang ekonomi.